

Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

e-Government Research in Indonesia: Systematic Literature Review from The Perspective of e-Government Ranking Dimension Indonesia

Firdaus Masyhur

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar
Jalan Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah II No.25, Makassar, 90123, Telp/Fax: 0411-4460084

firdaus.masyhur@kominfo.go.id

Naskah diterima: 13 Maret 2017, direvisi: 12 Mei 2017 disetujui: 17 Juli 2017

Abstrak

Perkembangan e-Government di Indonesia tidak menunjukkan tren positif. Faktor penyebabnya, antara lain minimnya kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan dalam memberikan berbagai masukan dalam mengoptimalkan investasi. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir dari perspektif dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literatur Review dengan sumber data Portal Garuda-Indonesian Publication Index (IPI). Jumlah artikel yang ditemukan sebanyak 105 yang kemudian dikelompokkan berdasarkan dimensi PeGI dan metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara kuantitas jumlah penelitian terkait e-Government masih kurang. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian penelitian juga tidak menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan e-Government di Indonesia. Namun fakta tersebut membuka potensi penelitian dengan tema e-Government yang masih sangat besar. Penelitian dengan tema ini membutuhkan dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai lembaga terkait sehingga berkontribusi meningkatkan posisi e-Government Indonesia.

Kata kunci: *e-Government, pemeringkatan e-Government Indonesia, studi literatur sistematis*

Abstract

e-Government development in Indonesia has not shown positive trend. One of the causes is the lack of contribution from research and development agencies in providing inputs in order to optimise investments. This study aims to explore studies that has been carried out in the past five years from the perspective of Indonesian e-Government Ranking Dimension, i.e. policy dimension, institutional dimension, infrastructure dimension, application dimension and planning dimension. This study uses Systematic Literature Review method

and data source from Portal Garuda – Indonesian Publication Index (IPI). The number of articles is 105, which then classified into PeGI dimension and research method used. Results of the study indicate that there are lack of e-Government studies. Moreover, there is no significant contribution in e-Government development in Indonesia. However, those facts suggest that there are wide potentials in exploring e-Government theme. Studies under this theme require governmental support and collaboration among relevant agencies in order to increase Indonesia e-Government status.

Keywords: *e-Government, Indonesia e-Government Ranking, Systematic Literatur Review*

PENDAHULUAN

Perkembangan *e-Government* di Indonesia mengalami kemunduran dibanding beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan hasil survei *e-Government* yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui data yang dirilis *publicadministration.un.org* menempatkan Indonesia di posisi 116 dari 193 negara. Posisi tersebut turun 10 peringkat dibanding 2 tahun lalu. Bahkan peringkat terbaik Indonesia hanya pada posisi 96 di tahun 2005. Bandingkan dengan Thailand yang berada di posisi 77, naik 25 peringkat dari tahun 2014. Begitu pula dengan Vietnam (89) dan Filipina (71) yang masing-masing naik 10 dan 24 peringkat. Fakta ini menjadi masalah serius bagi Indonesia di tengah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan pemerintah.

Secara nasional, penilaian implementasi *e-Government* juga dilakukan menggunakan 5 dimensi Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. PeGI bertujuan untuk menyediakan acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah serta mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Hanya saja, pada data yang disediakan tidak ditemukan nilai akhir nasional 2015 sehingga sulit membandingkan dengan hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh PBB. Data hasil penilaian disajikan berdasarkan lembaga/kementerian, provinsi dan

kabupaten/kota. Data PeGI untuk kementerian misalnya, dari skala 1 sampai 5 didapatkan angka 2,5 untuk dimensi kebijakan, 2,4 untuk dimensi kelembagaan, 2,5 untuk dimensi infrastruktur, 2,5 untuk dimensi aplikasi, dan 2,4 untuk dimensi perencanaan dengan rata-rata keseluruhan adalah 2,5. Berdasarkan metodologi pemeringkatan yang digunakan angka 2,5 berarti KURANG BAIK (pegi.layanan.go.id/). Angka-angka tersebut (pemeringkatan nasional dan internasional) menjadi fakta bahwa upaya membangun dan mengembangkan *e-Government* di Indonesia belum optimal. Dengan PeGI bahkan dapat dilihat kelemahan implementasi *e-Government* dari 5 dimensi yang digunakan.

Kebijakan pengembangan *e-Government* di Indonesia sebenarnya telah dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Sejak saat itu berbagai kebijakan lainnya dikeluarkan dan lembaga yang mendukung pengembangan *e-Government* mulai dibentuk. Lembaga yang dibentuk mulai yang bersifat independen seperti Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) hingga unit yang melekat pada kementerian yaitu Direktorat *e-Government* pada Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun,

dapat dipersepsikan bahwa lembaga-lembaga tersebut belum cukup efektif dalam menyusun strategi pembangunan *e-Government* sehingga waktu 13 tahun belum cukup bagi Indonesia untuk sejajar dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara dalam mengimplementasikan *e-Government*.

Peran lembaga kajian khususnya lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) juga perlu dipertanyakan. Lembaga Litbang merupakan salah satu unsur dalam pembangunan nasional, yakni sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka lembaga Litbang dituntut untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan yang dihadapi para pengguna IPTEK. Lembaga Litbang tidak boleh menjadi suatu entitas yang terisolir dari realita kebutuhan dan persoalan masyarakat dan negara. Dalam hal ini, hasil-hasil kajian terkait pengembangan *e-Government* juga dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada selama ini, serta menjadi acuan dalam merumuskan arah dan model pengembangan *e-Government* yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji hasil-hasil penelitian dengan tema *e-Government* di Indonesia dan melihat kebutuhan kajian selanjutnya dalam konteks *e-Government*. Sehingga penelitian-penelitian dengan tema *e-Government* selaras dengan kebutuhan pengambil kebijakan khususnya pemerintah. Studi literatur seperti ini penting untuk kebutuhan penelitian selanjutnya (Wahyudin, Hasibuan 2015), diantaranya untuk mengetahui posisi sebuah penelitian dan melihat potensi dan tren penelitian pada tema tertentu di masa depan.

Penelitian ini menggunakan dimensi Pemeringkatan *e-Government* Indonesia yang menjadi standar dalam penilaian implementasi *e-Government* di Indonesia. Dimensi yang digunakan adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Pemeringkatan dilaksanakan

dari tahun 2012 hingga 2015 dimana lembaga pemerintah dikelompokkan dalam beberapa klaster, yaitu Hasil PeGI Kabupaten/Kota per provinsi, Hasil PeGI Provinsi, Hasil PeGI Kementerian, dan Hasil PeGI Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Penilaian dilakukan menggunakan metode assesmen dengan teknik kuesioner kemudian diverifikasi oleh tim penilai. Hasil penilaian kemudian diumumkan setiap tahun beserta hasil pemeringkatannya.

Dimensi-dimensi PeGI yang dijelaskan pada situs Direktorat *e-Government* Kementerian Komunikasi dan Informatika (<http://pegi.layanan.go.id/>) bahwa dimensi kebijakan merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi *e-Government* yaitu berupa dokumen-dokumen resmi berisi antara lain penentuan dan penetapan arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi *e-Government* di lingkungan instansi. Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK. Selanjutnya dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK. Kemudian dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan *e-Government* secara langsung (*front office*) atau tidak langsung (*back office*). Terakhir adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk menggali data dan

informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau penelitian kemudian. Peneliti biasanya menggunakan penelitian eksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis. Penelitian eksploratori pada umumnya dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan "Apa (what)" (Apa sesungguhnya fenomena tersebut?).

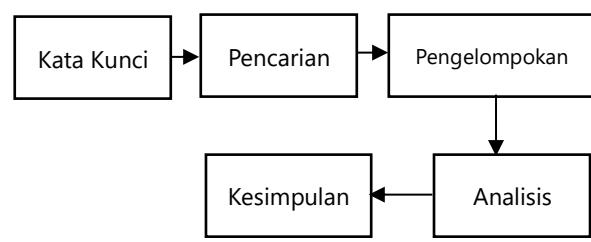
Tujuan dari penelitian eksploratif ini adalah untuk memetakan dan mengkaji isu-isu berbagai hasil penelitian dengan tema *e-Government* dari perspektif 5 dimensi Pemerintahan *e-Government* Indonesia (PeGI). Penggunaan PeGI dianggap relevan karena dimensi tersebut digunakan dalam menilai efektivitas pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah di Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana hasil-hasil penelitian *e-Government* di Indonesia dari perspektif dimensi PeGI? Isu-isu apa yang menjadi fokus penelitian pada masing-masing dimensi?

Pada penelitian ini ditetapkan bahwa sumber informasi adalah hasil penelitian terkait *e-Government* yang diambil dari situs *Indonesian Publication Index* dengan alamat website <http://id.portalgaruda.org/>. Portal Garuda IPI (*Indonesian Publication Index*) adalah suatu gerbang penelusuran, indeksasi, abstraksi, *monitoring*, dan untuk peningkatan standar kualitas publikasi ilmiah di Indonesia. Portal ini diinisiasi oleh komunitas ilmuan bernama *Institute of Advanced Engineering and Science* atau disingkat IAES wilayah Indonesia. Saat ini terdaftar 3.677 jurnal dengan jumlah artikel sebanyak 350.086 (id.portalgaruda.org, 2016).

Model penelitian yang digunakan ialah *systematic literature review* yang pernah digunakan oleh Alzahrani dkk. (2016)

sebagaimana digambarkan pada Gambar 1. Model penelitian yang sama juga digunakan oleh Yang dkk. (2017) dan Pickering & Byrne (2013) yang menggunakan *systematic review* untuk mengkaji isu terkait risiko perjalanan wisata dan gender, sedangkan Pickering membahas manfaat *systematic review* pada sebuah penelitian khususnya bagi mereka yang sedang menyelesaikan program doktoral.

Penelitian dimulai dengan menetapkan kata kunci pencarian, selanjutnya melakukan pencarian data melalui aplikasi mesin pencari yang telah ditetapkan. Berdasarkan kajian singkat (judul, abstrak dan kesimpulan) dari setiap artikel yang diambil, dilakukan pengelompokan data berdasarkan 5 dimensi PeGI dan metode penelitian yang digunakan. Data yang tidak terkait dengan 5 kelompok tersebut dimasukkan pada Kelompok "Lainnya". Kata kunci yang ditetapkan adalah "*e-Government*", "*e-Government* Indonesia", "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik". Jangka waktu penelitian ditetapkan adalah antara tahun 2011 hingga 2016.



Gambar 1. Model Penelitian

Langkah selanjutnya ialah melakukan analisis untuk masing-masing dimensi dengan tujuan untuk melihat isu-isu yang dikaji oleh peneliti. Cara ini dilakukan selain untuk mengelompokkan hasil penelitian, juga untuk memetakan berbagai permasalahan yang menjadi fokus penelitian *e-Government* di Indonesia dari perspektif PeGI yang digunakan dalam penelitian ini.

Terakhir ialah menyusun sebuah kesimpulan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian tentang hasil-hasil

penelitian *e-Government* di Indonesia berdasarkan dimensi PeGI serta Isu-isu yang menjadi fokus penelitian pada masing-masing dimensi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

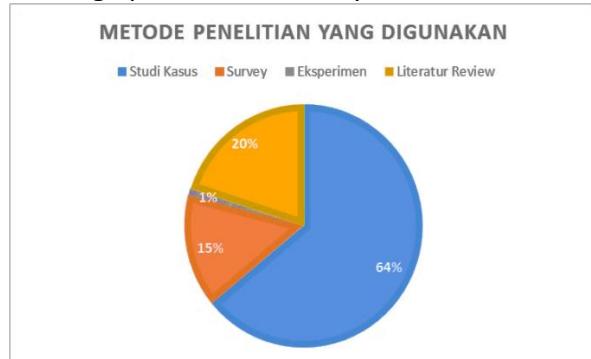
Berdasarkan hasil pencarian data melalui Portal Garuda dengan kata kunci yang telah ditentukan, ditemukan 105 artikel. Pada Gambar 2 digambarkan bahwa untuk dimensi kebijakan ditemukan sebanyak 32 (30%) artikel, dimensi kelembagaan sebanyak 8 (8%) artikel, dimensi aplikasi sebanyak 18 (17%) artikel, dimensi infrastruktur sebanyak 9 (9%) artikel, dan dimensi perencanaan sebanyak 8(8%) artikel. Adapun 30 artikel lainnya tidak dapat dikategorikan dalam dimensi-dimensi PeGI.



Gambar 2. Jumlah Penelitian Berdasarkan Dimensi PeGI

Selanjutnya dari artikel yang berhasil dikelompokkan (75 artikel), dilakukan pengelompokan berdasarkan metode penelitian yang digunakan (Gambar 3). Hasilnya ialah metode studi kasus merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh peneliti. Pemilihan metode ini diyakini karena para peneliti melakukan kajian yang spesifik khususnya yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Hasil penelitian dengan studi kasus tidak dapat menjadi rujukan

umum karena karakter dan kebutuhan setiap lembaga pemerintah berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya.



Gambar 3. Metode Penelitian Digunakan

Isu Penelitian Terkait Kebijakan

Jumlah artikel yang didapatkan pada bagian ini adalah 32 (30%) artikel. Isu-isu yang dibahas didominasi oleh kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) (Arsyad 2015; Mustam dkk. 2015; Sensuse dkk. 2015; Silalahi dkk. 2015; Darmawan 2011; Dewi dkk. 2014; Himawan 2012) yang dianggap kurang diperhatikan dan menjadi hambatan dalam implementasi *e-Government*. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun pemerintah daerah adalah memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur TIK. Pada praktiknya, kebijakan ini pun tidak optimal, terbukti masih banyak infrastruktur yang kurang terjamin ketersediannya, terutama jaringan internet (Ramawati dkk. 2016, p. 4; Vergien, Marta 2016; Sudrajat 2015; Yuni Lestari dkk. 2015; Astuti dkk. 2013).

Secara umum, hasil-hasil penelitian terkait isu kebijakan menggunakan data kualitatif dengan metode studi kasus. Dengan itu, isu ini tidak dapat digeneralisir karena bisa saja kebijakan terkait SDM yang tidak efektif serta infrastruktur yang tidak optimal tidak terjadi di beberapa daerah. Isu lain yang dibahas adalah produk hukum yang mendukung implementasi *e-Government*, perencanaan (Wahyuni, Angraini 2015), serta proses kerja yang berorientasi pada proses kerja berbasis digital.

Sebagai solusinya ialah perlu dikaji secara luas, bila perlu secara nasional, model-model kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mendorong implementasi *e-Government*. Kemudian dibutuhkan model sinkronisasi kebijakan pengembangan *e-Government* antara pemerintah pusat dan daerah yang kerap menimbulkan masalah ketimpangan. Misalnya isu pembangunan infrastruktur internet melalui program *Universal Service Obligation* (USO) yang berlajalan sejak tahun 2013. Isu kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat mengadopsi model-model komunikasi yang efektif yang berdampak pada tercapainya tujuan program.

Isu Penelitian Pada Dimensi Kelembagaan

Terdapat 8 artikel (8%) yang ditemukan pada Portal Garuda yang membahas tentang aspek kelembagaan *e-Government*. Isu yang menarik antara lain pengaruh karakter individu dalam implementasi *e-Government* (Karis, Tyas Catur, 2011). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa karakter individu sangat signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi *e-Government*. Pengaruh ini ditentukan oleh faktor umur, pendidikan, dan pengalaman kerja. Faktor tersebut diikuti oleh pengaruh sikap individu.

Penelitian lain dilakukan oleh Resta (2013) yang mengkaji peran bagian Pengolahan Data Elektronik dalam penyelenggaraan *e-Government* di Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan aspek-aspek strategis dalam implementasi pelayanan informasi berbasis internet. Penelitian ini juga menjelaskan berbagai hambatan penerapan *e-Government*, yaitu budaya berbagi belum ada dimana kultur berbagi (*sharing*) informasi belum terbiasa karena ego-sektoral Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih tinggi. Budaya mendokumentasi juga belum lazim serta kurangnya SDM yang handal yaitu staf yang

menguasai bidang TIK sangat terbatas dan kurang merata di semua SKPD serta kurang tepat dalam hal penempatan kerjanya. Infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya penghargaan atau jenjang karier yang jelas bagi pengelola data fungsional sehingga banyak staf yang kurang termotivasi di bidang ini.

Potensi riset pada isu kelembagaan ini sebenarnya sangat besar karena isu tersebut termasuk hambatan utama dalam implementasi *e-Government* di Indonesia (Silalahi dkk., 2015). Isu yang menarik dikaji misalnya terkait peran dan posisi *Chief Information Office (CIO)* dalam struktur pemerintahan di Indonesia, atau peran dan fungsi *Government Public Relation (GPR)* pada lembaga pemerintah serta bagaimana profesi tersebut memanfaatkan teknologi informasi. Kedua isu tersebut juga merupakan program strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana dalam beberapa tahun telah dilaksanakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi. Dengan demikian, hambatan-hambatan terkait kelembagaan sebenarnya sudah teratasi dan berjalan efektif pada lembaga pemerintah.

Isu Penelitian Pada Dimensi Infrastruktur

Pada dimensi ini ditemukan 9 artikel (9%) yang membahas tentang infrastruktur TIK dalam mendukung implementasi *e-Government* di Indonesia. Pembahasan mendalam tentang infrastruktur memang tidak ditemukan, seperti kajian konektivitas serta pembangunan jaringan *backbone* untuk mendukung infrastruktur *e-Government*, atau pengembangan jaringan berbasis radio. Namun salah satu artikel membahas tentang arsitektur dasar untuk membangun sebuah *middleware* untuk mengintegrasikan layanan *e-Government* yaitu pada artikel yang ditulis oleh Hijrih & Prasetyo (2015). Dengan adanya *middleware* integrasi berbagai layanan pemerintah diharapkan dapat meningkat. Performa, kinerja dan kualitas layanan publik pemerintah dapat ditingkatkan. Komponen

yang dibangun dalam *middleware* pada artikel ini dirasa dapat memenuhi kebutuhan, kerahasiaan, dan fleksibilitas layanan.

Potensi kajian pada isu ini masih sangat besar, khususnya dalam lingkup pengembangan *e-Government* di Indonesia. Belum ditemukan kajian yang membahas pembangunan jaringan pita lebar, Program Palapa Ring dalam kaitannya dengan penetrasi perkembangan *e-Government* di Indonesia. Pertanyaan seperti apakah daerah yang terjangkau jaringan Palapa Ring sudah mendapatkan layanan internet yang memadai? Atau apakah tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh dengan adanya akses pita lebar di daerah? Merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menarik untuk dikaji. Tentu saja masih banyak masalah yang menarik untuk dikaji apabila peneliti dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi *e-Government* di Indonesia.

Isu Penelitian Pada Dimensi Aplikasi

Dimensi aplikasi merupakan tema yang paling banyak dibahas dengan jumlah 18 artikel atau 17%. Dari hasil telaah yang dilakukan terhadap seluruh artikel pada tema ini, hasilnya kemudian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok yang membahas pengembangan dan pemanfaatan *website*, kelompok yang membahas aplikasi administrasi dan sistem informasi manajemen, dan kelompok yang membahas pembangunan dan pengembangan aplikasi berbasis *online*. Di antara artikel yang membahas *website* ialah yang ditulis oleh Fuadi & Marom (2016), Noviana dkk. (2015), dan Suwitri dkk. (2012). Secara umum para penulis membahas secara teknis arsitektur rancangan pengembangan media menggunakan teknologi *website* untuk menyebarkan informasi. Sementara itu, pembahasan tentang sistem informasi dan aplikasi administrasi diantaranya Aulia Rachma & Puspasari (2015), Ketty Djawa & Puspasari (2015), Salamah & Puspasari

(2015), Ulima Rahmah & Elizabeth R (2015), dan Handayaningsih & Ghozali (2014). Secara mendalam para penulis membahas pemanfaatan aplikasi TIK untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah serta konstruksi sistem informasi yang juga untuk memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah. Kemudian Romdoni (2013), Gati (2014), dan Nugroho (2015) membahas lebih lanjut pemanfaatan aplikasi berbasis online untuk memenuhi kebutuhan sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Pembahasan bukan hanya pada sisi teknis, tetapi juga bagaimana aspek manajemen agar implementasi aplikasi berbasis *online* dapat berjalan efektif.

Isu Penelitian Pada Dimensi Perencanaan

Dengan jumlah artikel 8 atau 8%, tema perencanaan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 yaitu perencanaan pembangunan *e-Government* dan perencanaan pengembangan aplikasi (sistem informasi). Perencanaan pembangunan *e-Government* membahas hal non-teknis seperti kebijakan, anggaran, serta kesiapan SDM. Sementara itu, perencanaan pengembangan sistem informasi bersifat teknis dan disertai notasi atau simbol-simbol yang umum digunakan dalam perancangan sistem informasi.

Penelitian dengan tema perencanaan pengembangan *e-Government* diantaranya ditulis oleh Mardahayati (2012), Slamet (2013), Alusi & Sensuse (2014), Nugroho dkk. (2015), dan Fairuzabadi, Erizal (2015). Para peneliti menggunakan berbagai pendekatan dalam menyusun perencanaan, di antaranya ada yang menggunakan Dimensi PeGI seperti yang digunakan pada tulisan ini. Sementara itu artikel yang membahas tentang perencanaan pengembangan sistem informasi diantaranya ditulis oleh Bhaskara (2016) yaitu Perencanaan Program Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dalam Penerapan *e-Government*. Namun, dalam artikel ini, selain aspek teknis, penulis juga membahas aspek non-teknis seperti

penyiapan SDM dan sumber anggaran implementasi.

Artikel yang tergabung dalam kelompok "Lainnya" lebih banyak membahas penggunaan kerangka kerja dalam penilaian implementasi *e-Government* seperti yang dilakukan oleh Saputro dkk. (2015), dan Suhardi dkk. (2015). Kajian lain dilakukan dalam bentuk studi literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi *e-Government*. Seperti yang dilakukan oleh Behrens (2012), Sophia Dewi & Haryanto (2013), dan Napitupulu (2015). Penelitian-penelitian tersebut juga menarik untuk dibahas dari perspektif yang lain sehingga memperkaya hasil kajian dalam penelitian-penelitian bertema *e-Government* selanjutnya.

PENUTUP

Secara kuantitas artikel hasil penelitian dengan tema *e-Government* Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih sangat kurang. Jumlah ini diyakini berdampak pada kurangnya kontribusi lembaga penelitian dalam memberikan data dan informasi terkait formulasi pengembangan *e-Government* di Indonesia. Hal ini juga diyakini menjadi salah satu faktor inkonsistensi pengembangan *e-Government* yang ditandai dengan posisi peringkat Indonesia pada penilaian *e-Government* PBB yang menurun.

Fakta lainnya mengungkapkan bahwa potensi kajian tentang *e-Government* dan tema yg terkait dengan bidang tersebut masih sangat besar. Dukungan pemerintah serta kolaborasi dengan lembaga terkait juga perlu didorong terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan kajian sehingga penelitian yang dilakukan oleh para peneliti selaras dengan kebutuhan lembaga tersebut (*demand-driven*) dan menjadi hasil penelitian yang efektif.

Penggunaan dimensi PeGI dapat dijadikan salah dimensi dalam mengeksplorasi implementasi *e-government* dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu dimensi PeGI merupakan sebuah perspektif yang dapat dijadikan acuan karena efektif dalam menilai peringkat *e-Government* di Indonesia. 5 dimensi PeGI juga berpotensi dikembangkan dengan menambahkan perspektif lain sesuai dengan perkembangan bidang ini.

Penggunaan metode *systematic literature review* juga efektif dalam kajian literatur terutama dalam melakukan studi awal sebuah bidang pengetahuan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sumber informasi yang masih dapat diperluas, misalnya sumber artikel internasional. Dengan demikian, hasil kajian dapat menunjukkan posisi temuan penelitian baik pada cakupan nasional maupun internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada segenap jajaran pimpinan dan staf Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPKI) Makassar yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alusi, Fahmi; Sensuse, Dana Indra (2014): Penyusunan Strategi E-Government Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (Pegi) di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. In *Faculty of Computer Science Universitas Indonesia* (2014): Jurnal Sistem Informasi. <http://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/376>.
- Alzahrani, Latifa; Al-Karaghoudi, Wafi; Weerakkody, Vishanth (2016): Analysing the critical factors influencing trust in e-

- government adoption from citizens' perspective. A systematic review and a conceptual framework. In *International Business Review* 26 (1), pp. 164–175. DOI: 10.1016/j.ibusrev.2016.06.004.
- Arsyad, Arsyad (2015): Studi Implementasi E-Government di Daerah Perbatasan. In *BBPKI MAKASSAR* Vol 18, No 1 (2015): April 2015. http://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pe_kommas/article/view/255.
- Astuti, Puji; Hermini, Rr; R, Esha Yanuar (2013): Praktek e-Government Dalam Administrasi Kependudukan Studi Pelaksanaan Perekaman e-KTP di Kabupaten Pemalang. In *Journal of Politic and Government Studies* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013.
- Aulia rachma, e. V.i.; Puspasari, Durinda (2015): Penggunaan Aplikasi E-Surat SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) Dalam Pengelolaan Arsip Elektronik Untuk Mendukung E-Government Di Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. In *Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP)* Vol 3, No 3 (2015): Volume 3 Nomor 3 edisi 2015. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/12515>.
- Behrens, Christoph (2012): Success Factors for an E-Government Strategy: Austrian Experiences, Indonesian Challenges. In *APSPA* Vol 3, No 1 (2012): February 2012. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jspa/article/view/148>
- Bhaskara, Yoga Prasetya (2016): Perencanaan Program Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dalam Penerapan E-Government (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik). In *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya* Vol 4, No 2 (2016). <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1150>.
- Darmawan, Ikhsan (2011): E-Government: Studi Pendahuluan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Slragen. In *e-JLAN* Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011.
- Dewi, Mega Hayuning Puspa; Sulandari, Susi; Rostyaningsih, Dewi (2014): Implementasi E-Government di Kabupaten Wonosobo. In *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/5125>.
- Fairuzabadi, Muhammad; Erizal, Erizal (2015): Master Plan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. In *Dinamika Informatika* Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Dinamika Informatika. <http://upy.ac.id/ojs/index.php/dinf/article/view/109>.
- Fuadi, Ahmad Iqbal; Marom, Aufarul (2016): Implementasi E-Government Melalui Media Informasi Publik Berbasis Website Daerah di Kabupaten Tegal. In *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/13625>.
- Gati, Rindri Andewi (2014): Efektivitas Program Surabaya Single Window (SSW) dalam Pelayanan Publik. Perspektif E-Government (Studi Tentang Perijinan Online Di Kota Surabaya). In *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya* Vol 2, No 6 (2014). <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/516>.
- Handayaningsih, Sri; Ghozali, Imam (2014): Pembuatan Model Customer Relationship Management (CRM) E-Government Di Dinas Kelautan dan Perikanan D.I.Y. In *Jurnal Sarjana Teknik Informatika* Vol 2, No 1 (2014): Februari. <http://journal.uad.ac.id/index.php/JSTIF/article/view/2608>.
- Hijrih, Fatchul; Prasetyo, Taufan Harry (2015): Desain Arsitektur Enterprise Application Integration (EAI) Sebagai Middleware Untuk Aplikasi Pemerintah (E-Government). In *Proceedings Konferensi*

- Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I)* 2015. <http://ejournal.stikom-bali.ac.id/index.php/knsi/article/view/432>.
- Himawan, Hidayatulah (2012): Implementasi dan Analisa Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Perkembangan E-Government. In *Jurusan Teknik Informatika* Vol 1, No 4 (2012): Information System and Application. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/se-nasif/article/view/1112>.
- Karis, Widyatmoko; Tyas Catur, Pramudi Y. (2011): Model Penggunaan Teknologi Informasi Dan Kinerja Pegawai Kelurahan Menuju Terwujudnya E-Government. In *Semantik* Vol 1, No 1 (2011): Prosiding Semantik 2011. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/se-mantik/article/view/147>.
- Ketty Djawa, Maria; Puspasari, Durinta (2015): Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Untuk Mendukung E-Government Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. In *Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP)* Vol 3, No 3 (2015): Volume 3 Nomor 3 edisi 2015. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/12522>.
- Mardahayati, Mrs. (2012): Perencanaan Pengembangan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik Di Kota Solok. In *FIA UB* Vol 13, No 1 (2012): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jia-p/article/view/273>.
- Mustam, Mochammad; Warsono, Hardi; Cynthia, Cynthia (2015): Analisis Pengembangan E-Government di Pemerintahan Kota Tangerang. In *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro* Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/8272>.
- Napitupulu, Darmawan (2015): Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government: Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. In *Jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya* Volume 5, Number 3, 2015. http://si.its.ac.id/data/sisfo_data/files/9_vo15no3.pdf.
- Noviana, Rina; Sulandari, Susi; Lituhayu, Dyah (2015): Manajemen e-Government Berbasis Web Model Government-to-Citizen (G2C) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. In *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro* Vol 4, No 3 (2015): Tahun 2015. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/8949>.
- Nugroho, Eko; Setiawan, Noor Akhmad; Setyadi, Daru Hagni (2015): Peran Dimensi-Dimensi PeGI dalam Penyusunan Rencana Induk/ Rencana Strategis Pengembangan E-Government dengan Menggunakan Kerangka Kerja Arsitektur TOGAF®. In *Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia* 2015. <http://journal.uii.ac.id/index.php/Snati/article/view/3547>.
- Nugroho, Kristiawan (2015): Perancangan Sistem E-Government Untuk Memperkenalkan Potensi Daerah dan Investasi Kabupaten Rembang. IN *P3M AMIK JTC VOL 11, NO 4 (2015): INFOKAM EDISI I Tahun 10 2015 (Maret)*. <http://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/73>.
- Pickering, Catherine; Byrne, Jason (2013): The benefits of publishing systematic quantitative literature reviews for PhD candidates and other early-career researchers. In *Higher Education Research & Development* 33 (3), pp. 534–548. DOI: 10.1080/07294360.2013.841651.
- Ramawati, Ni Made Indra; Pascarani, Ni Nyoman Dewi; Supriliyani, Ni Wayan (2016): PenerapanE-Office Dalam Rangka Mewujudkan E-Government (Studi Kasus: Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali). In *CITIZEN CHARTER* Vol 1, No 1 (2016). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/23734>.

- Resta, Adi (2013): Peran Bagian Pengolahan Data Elektronik Dalam Penyelenggaraan E-Government (Studi Pendayagunaan Website Resmi Kota Semarang). In *Journal of Politic and Government Studies* 2 (4).
- Romdoni, Mochammad Rizki (2013): Perancangan Portal Interoperabilitas e-Government Sebagai Platform Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Kota Denpasar. In *Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana* Vol. 4, No.3 Desember 2013. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/lontar/article/view/16731>.
- Salamah, Ummu; Puspasari, Durinda (2015): Pemanfaatan Sabda Dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penerapan E-Government Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. In *Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP)* Vol 3, No 3 (2015): Volume 3 Nomor 3 edisi 2015. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/12546>.
- Saputro, Pujo Hari; Budiyanto, Djoko; Santoso, Joko (2015): Model Delone and Mclean Untuk Mengukur Kesuksesan E-Government Kota Pekalongan. In *Universitas Negeri Semarang* Vol 2, No 1 (2015). <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/sji/article/view/4523>.
- Sensuse, Dana Indra; Hakiem, Nashrul; Afrizal, Sarika (2015): Analisis Kesiapan Implementasi E-Government Pada Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. In *Faculty of Computer Science Universitas Indonesia* Vol 11, No 2 (2015): Jurnal Sistem Informasi. <http://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/429>.
- Silalahi, Mesnan; Napitupulu, Darmawan; Patria, Gulda (2015): Kajian Konsep dan Kondisi e-Government di Indonesia. In *Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur* Vol 1, No 1 (2015). <http://unbj.net/e-journal/index.php/08/article/view/80>.
- Slamet (2013): Manajemen Strategik Sebagai Pendekatan Dalam Mengembangkan E-Government Di Indonesia. In *IQTISHODUNA* 9 (1). <http://ejurnal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2283>.
- Sophia Dewi, Annasia; Haryanto, Haryanto (2013): Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government (Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Di Indonesia). In *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013. <http://ejurnal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5925>.
- Sudrajat, Raharwindy Kharisma (2015): Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. In *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya* Vol 3, No 12 (2015). <http://administrasipublik.studentjurnal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1111>.
- Suhardi, Suhardi; Sofia, Alfira; Andriyanto, Agustinus (2015): Evaluating e-Government and Good Governance Correlation. In *ITB Journal Publisher, LPPM ITB* Vol 9, No 3 (2015). <http://journals.itb.ac.id/index.php/jictra/article/view/1183>.
- Suwitri, Sri; Djumiarti, Titik; Fitriani, Rizka (2012): Analisis Penerapan Website Dalam Rangka E-Government Di Kabupaten Tegal. In *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012. <http://ejurnal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/1328>.
- Ulima Rahmah, Shabrina; Elizabeth R, Meylia (2015): Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Menerapkan E-Office Untuk Mendukung E-Government Dalam Kegiatan Korespondensi Kedinasan Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. In *Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP)* Vol 3, No 3 (2015): Volume 3 Nomor 3 edisi 2015. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/12530>.
- Vergien, Gianio; Marta, Auradian (2016): Pelaksanaan E-Government Di Kantor Imigrasi Kelas Ia Kota Pekanbaru Tahun 2014. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu*

- Politik Universitas Riau* Vol 3, No 2: WISUDA OKTOBER 2016. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/10534>.
- Wahyudin, Asep; Hasibuan, Zainal A. (Eds.) (2015): Research Classification in Strategic Information System Planning Development. A Critical Review. International Conference on Science in Information Technology (ICSITech). Institute of Electrical and Electronics Engineers; Universitas Ahmad Dahlan; International Conference on Science in Information Technology; ICSITech. Piscataway, NJ: IEEE. <http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=7399124>.
- Wahyuni, Fitri; Angraini, Angraini (2015): Evaluasi Penerapan E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Menggunakan Pendekatan Metode Peg. In *Department of Information System of UIN SUSKA Riau* Vol 1, No 1 (2015): Februari. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/view/1303>.
- Yang, Elaine Chiao Ling; Khoo-Lattimore, Catheryn; Arcodia, Charles (2017): A systematic literature review of risk and gender research in tourism. In *Tourism Management* 58, pp. 89–100. DOI: 10.1016/j.tourman.2016.10.011.
- Yuni Lestari, Ni Luh; S.Fil., M. BandiyahA; Dwi Wismayanti, Kadek Wiwin (2015): Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Studi Kasus Pengelolaan Pengaduan Rakyat Online Denpasar Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2014). In *CITIZEN CHARTER* Vol 1, No 2 (2015). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/16766>.